

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT (2012-2017)

INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY IN ENHANCING INDONESIA-UNITED STATES DEFENSE COOPERATION (2012-2017)

Syaiful Anwar¹, Lasmono², Firda Nuzulia³
Prodi Diplomasia Pertahan Fakultas Strategi Pertahanan
(firda.nuzulia@idu.ac.id)

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya Diplomasia Pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS periode 2012-2017. Hal ini dihadapkan dengan adanya ketidaksetaraan yang terdapat pada kerjasama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat (AS) dengan masih diberlakukannya *human rights vetting* oleh AS terhadap Indonesia, dan juga isu-isu yang terjadi pada Indonesia dan AS baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi hubungan keduanya. Penelitian ini fokus kepada diplomasia pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS periode 2012-2017 dengan dua karakter utama yaitu *confidence building measures* dan *capacity building*. Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan konsep dan teori diplomasia pertahanan, kerjasama pertahanan, dan geopolitik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketujuh indikator diplomasia pertahanan dalam tatanan *confidence building measures*; empat indikator yaitu *communication*, *consultation*, *transparency*, dan *goodwill* telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan tiga indikator yaitu *economic CBM*, *socio cultural CBM*, dan *Political CBM* belum dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, diharapkan terdapat solusi untuk meningkatkan tiga indikator tersebut sehingga CBM dapat terbangun dengan baik dan kerjasama pertahanan kedua negara dapat meningkat. Kemudian, dari kedua indikator diplomasia pertahanan dalam tatanan *capacity building* yaitu kerjasama strategis dalam bantuan militer, dan pembelian alutsista dalam rangka meningkatkan kapabilitas pertahanan negara sudah dilakukan dengan baik oleh kedua negara.

Kata Kunci: Diplomasia Pertahanan, Kerjasama Pertahanan Indonesia-AS, *confidence building measure*, *capacity building*

Abstract—The research aims to analyze Indonesia Defense Diplomacy in enhancing Indonesia-United States (US) defense cooperation period of 2012-2017. It is confronted with inequalities in Indonesia-US defense cooperation shown by the implementation of human rights vetting by the United States against Indonesia, as well as issues that occur in Indonesia and the United States both internally and externally which may affect their relations. This research focuses on Indonesia defense diplomacy in enhancing Indonesia-US in two major characteristics; those are confidence building measures (CBM) and capacity building. In analyzing data, concepts and theories of defense diplomacy, defense cooperation, and geopolitics are used. The research applies qualitative-descriptive method, and several interviews and content analyses were used in data collection technique. The results indicate that four of seven indicators of defense diplomacy in confidence building measures; which are communication, consultation, transparency, and

¹ Mayjen TNI Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A., Dosen Diplomasia Pertahanan di Universitas Pertahanan

² Brigjen TNI Lasmono, M.Si (Han), Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) di Universitas Pertahanan.

³ Firda Nuzulia, S.Pd., M.Han., Alumnus Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, Prodi Diplomasia Pertahanan.

goodwill have been implemented well. Besides, another three indicators; economic CBM, socio cultural CBM, and Political CBM have not been well implemented. Therefore, solutions in improving these three indicators are needed to build the CBM and defense cooperation between the two countries. Furthermore, two indicators of defense diplomacy in capacity building, which are strategic cooperation in military aid and the purchase of major weapon system to improve defense capability, have been well implemented by both countries.

Key words: *Defense Diplomacy, Indonesia-US Defense Cooperation, confidence building measure, capacity building*

Pendahuluan

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang sejak awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Kedua negara ini pula telah menjalin kerjasama sejak tahun 1950-an, salah satunya pada bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan Indonesia-AS terus mengalami perkembangan dan banyak peralatan militer seperti pesawat tempur maupun pesawat angkut yang diperoleh Indonesia dari AS. Akan tetapi, hubungan kedua negara menjadi dingin pada tahun 1990an.

Kerjasama antara Indonesia dan AS mulai dibatasi setelah terjadi pembunuhan masal di Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada tahun 1991. Delapan tahun kemudian, AS menjatuhkan embargo terhadap Indonesia atas respon dari intervensi militer yang dilakukan Indonesia pada tahun 1999 untuk mencegah pemisahan diri Timor Timur yang menewaskan lebih dari 1.500 warga sipil dan merusak 70 persen

infrastrukturnya⁴. Embargo ini berdampak pada kerjasama pertahanan dan segala bentuk bantuan, termasuk segala macam bantuan peralatan alutsista. Salah satu alutsista yang terkena dampak yaitu pesawat tempur F-16 yang tidak mampu mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan sehingga tidak dapat menjaga kepulauan Indonesia dan terancam menjadi besi tua⁵. Selain itu, kerjasama pertahanan di bidang pelatihan dan pendidikan militer juga dihentikan, sehingga Indonesia tidak dapat lagi mengirimkan perwira-perwiranya untuk belajar di AS.

Selain berdampak pada kerjasama pertahanan kedua negara, sanksi embargo ini pun berdampak pada penurunan kekuatan dan kemampuan militer Indonesia. Pemerintah Indonesia

⁴ Scott Morrissey. *U.S Lifts Indonesia Arms Embargo*. (Washington DC: Arms Control Association, 2006), Diakses pada 28 September 2017, dari https://www.armscontrol.org/act/2006_01-02/JANFEB-Indonesia

⁵ Diakses dari <http://www.upi.com/Archives/1996/03/08/Indonesia-may-buy-F-16-fighters/8354826261200/>, pada 07 Oktober 2017

terus berupaya untuk tetap mampu mempertahankan pertahanan negara baik dengan terus berupaya menormalisasikan hubungannya dengan AS, ataupun dengan membeli alutsista dari negara lain. Pada November 2005, upaya tersebut berbuah baik, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Sean McCormack, resmi mengumumkan pencabutan embargo terhadap Indonesia. Akan tetapi, embargo belum dicabut sepenuhnya, dimana pelepasan sanksi ini hanya kepada penjualan perlengkapan militer yang bersifat tidak mematikan (*non-lethal military equipment*), sebagaimana yang dinyatakan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Richard Boucher bahwa pencabutan embargo sepenuhnya bergantung pada kerjasama penanganan terorisme, penanganan hukum bagi anggota TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM, dan juga akuntabilitas dan transparansi keuangan militer Indonesia⁶.

Kerjasama pertahanan kedua negara terus mengalami peningkatan, kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, IMET (International Military Education Training); latihan bersama,

“Garuda Shield” mulai dibuka kembali pada tahun 2006⁷. Kemajuan juga ditandai dengan penawaran AS mengenai hibah pesawat F-16 24 unit (Altileri, 2012), dan pembelian helikopter tempur Apache 64E Guardian yang menandakan sudah baiknya hubungan kedua negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri AS, Chuck Hagel, bahwa hal tersebut merupakan bentuk kepercayaan AS untuk membangun kemampuan militer Indonesia.⁸

Meskipun banyak kemajuan yang dicapai oleh kedua negara, terlihat bahwa AS masih belum percaya pada Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan. Hal ini ditunjukkan dengan masih diberlakukannya *Human Rights Vetting* terhadap militer Indonesia. *Human Rights Vetting* ini merupakan hukum yang dikeluarkan oleh Kongres AS atas keberatannya akan keputusan pemerintah AS untuk membuka kembali

⁷ C. P. Winarso, 2013, *Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia Sebelum dan Sesudah Embargo Senjata, Dikaji Dalam Bidang Militer*. Diakses pada 15 Agustus 2017 dari Education and Cultural Attache: <http://education.embassyofindonesia.org/2013/10/hubungan-amerika-serikat-dengan-indonesia-sebelum-dan-sesudah-embargo-senjata-dikaji-dalam-bidang-militer/>

⁸ Rojes Saragih, 2013, *Amerika Serikat Setujui Penjualan AH-64E Apache*, diakses pada 29 Agustus 2017, dari <https://jakartagreater.com/amerika-serikat-setujui-penjualan-ah-64e-apache/>.

⁶ Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Damai*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm . 42.

program pelatihan satuan elite militer Indonesia, pada tahun 2010.⁹ Hukum yang dikenal juga dengan Leahy Law ini melarang negara melatih militer asing yang memiliki sejarah pelanggaran HAM, kecuali mereka yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran tersebut dan diproses secara hukum.

Setiap personel militer Indonesia yang akan dikirimkan ke Amerika Serikat, baik untuk menjalani pendidikan, latihan militer, kursus dan lain sebagainya harus menjalani proses *vetting*. Dalam proses itu, riwayat hidup setiap individu personel militer diteliti secara khusus oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kejadian penangguhan izin kunjungan AS ini belum lama pun sempat terjadi kepada panglima TNI, Gatot Nurmantyo, yang dilarang memasuki wilayah Washington DC, AS.¹⁰ Hal demikian tentu saja memunculkan kondisi ketidaknyamanan bagi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu prinsip kerjasama pertahanan adalah

kesetaraan dalam mencapai kepentingan bersama dan saling menguntungkan.¹¹

Selanjutnya, dilihat dari berbagai kegiatan kerjasama pertahanan antara Indonesia – AS baik di bidang pendidikan maupun di bidang pelatihan militer yang diselenggarakan masih pada level taktis dan teknis, belum pada level strategis. Strategi militer berupa pembinaan, pengembangan, penggelaran dan penggunaan seluruh kekuatan dan kemampuan militer untuk mendukung strategi pertahanan dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional. Pembinaan dan penggunaan militer diarahkan pada keterpaduan tiga angkatan (Darat, Laut, dan Udara) tanpa meninggalkan ciri khas angkatan, baik dalam operasi gabungan maupun operasi angkatan masing-masing.

Jika dibandingkan, strategi lebih besar dalam perspektif daripada taktik militer yang merupakan disposisi dan manuver dari unit tertentu atau medan pertempuran laut. Hal tersebut dapat dilihat dari materi kegiatan yang diimplementasikan dalam pelatihan dan pendidikan tersebut, seperti latihan

⁹ Yuniman Farid, 2010, AS Kembali akan Latih Kopassus?, diakses pada 09 Oktober 2017, dari Deutsche Welle: <http://www.dw.com/id/as-kembali-akan-latih-kopassus/a-5825360>

¹⁰ Ramadhan Rizky, 2017, *Kronologi Panglima TNI ditolak Masuk Amerika Serikat*, diakses pada 23 November 2017, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017102182029-20-250164/kronologi-panglima-tni-ditolak-masuk-amerika-serikat/>.

¹¹ Makarim Wibisono, *Defense Cooperation in International Relation Paradigm*. Dipresentasikan pada perkuliahan *Defense Cooperation*, 8 Mei 2017, Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.

bersama Korps Marinir TNI AL dengan United States Marine Corps (USMC) yang merupakan bagian dari latihan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT). Materi kegiatan yang dilakukan seperti latihan menembak senapan, menembak mortir 60 mm, GPMG, sniper, jungle survival, patroli, dan juga raid.¹² Selain itu, dapat dilihat pula pada latihan bersama Garuda Shield yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara anggota CPX (*command Post Exercise*) kedua Negara. Latihan bersama Garuda Shield meliputi taktik-taktik perang serta penggunaan alutsista buatan Amerika Serikat, melatih kecakapan tentara Indonesia untuk berperang, dan juga mengajarkan cara-cara penanggulangan bencana. Dapat dilihat bahwa pada pelatihan tersebut belum mencapai level strategis dimana melibatkan batalyon dan bergabungnya 3 matra TNI.

Di lain sisi, walaupun hingga saat ini, kerjasama kedua negara terlihat baik, isu-isu kecil yang terjadi baik di dalam maupun diluar bidang pertahanan yang berkaitan antara kedua negara perlu

mendapat perhatian khusus. Begitu pula dengan isu internal negara masing-masing yang dapat mempengaruhi perspektif Indonesia ke AS, maupun AS ke Indonesia juga perlu diberi perhatian.

Hubungan kerjasama kedua negara tidak akan rusak dalam waktu dekat, citra AS di mata Indonesia merupakan perkembangan yang luar biasa di era Obama dalam hubungan AS dengan negara Muslim. Akan tetapi, pada era pemerintahan Donald Trump menunjukkan ketidakpastian atas kebijakan yang ia buat. Salah satu kebijakan yang ia jalankan pasca pelantikannya sebagai presiden AS yaitu kebijakannya mengenai islamophobic rhetoric, yaitu dengan diberlakukannya larangan bagi beberapa negara Muslim untuk datang ke AS. Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam negara yang terkena larangan tersebut, beberapa warga Indonesia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studi di AS atau sekedar berkunjung ke negeri tersebut. Meskipun konsekuensi lonjakan sentimen anti-Amerika di Indonesia sulit diprediksi, risiko tersebut perlu mendapat perhatian khusus, karena banyak hal tak terduga dari kepresidenan AS seperti retorika proteksi Trump dan inklusinya terhadap Indonesia yang masuk ke dalam daftar

¹² Grasella Sovia, Mingkid, 2017, *Marinir Indonesia-Amerika Gelar Latihan Bersama di Situbondo*. Diakses pada 20 Oktober 2017, dari Detik News: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3632509/marinir-indonesia-amerika-gelar-latihan-bersama-di-situbondo>.

kontributor defisit perdagangan global AS. Selain isu yang terjadi di antara kedua negara, isu dalam negeri juga memberikan pengaruh terhadap hubungan Indonesia–AS, seperti peristiwa pemilu Gubernur Jakarta yang dilaksanakan awal tahun lalu yang menimbulkan berbagai interpretasi negara-negara di dunia, termasuk AS, bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Pemilu ini dipandang sebagai ujian toleransi agama, etnik, dan juga politik di dalam negeri dan juga reputasi Indonesia sebagai negara Muslim paling toleran di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat.¹³ Kemudian, hal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran negara di dunia bahwa kelompok Islam garis keras akan terus berusaha menggunakan agama sebagai senjata politik. Hal ini pula ditakutkan akan mendorong kebangkitan Al-Qaeda, yang telah dihapuskan oleh pemerintah Indonesia secara efektif.¹⁴

¹³ Prashanth Parameswaran, 2017, *Trumps' Indonesia Challenge Begins with Pence Visit*. Diakses pada 28 September 2017, dari the Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/04/trumps-indonesia-challenge-begins-with-pence-visit/>.

¹⁴ The Editorial Board, 2017, *Election Tests Indonesian Democracy*, diakses pada 25 September 2017, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/04/27/opinion/election-tests-indonesian-democracy.html>.

Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa kerjasama pertahanan Indonesia-AS perlu ditingkatkan karena melihat dalam kerjasama pertahanan yang terjalin antara kedua negara ini masih ada ketidaksetaraan antara Indonesia dengan AS dimana AS masih memberlakukan *human rights vetting* terhadap militer Indonesia. Dan juga melihat dari hubungan kedua negara dimana masih terdapat isu-isu politik yang terjadi yang dapat mempengaruhi *Confidence Building Measures* (CBM) atau rasa saling percaya kedua negara demokrasi ini. Kemudian, melihat kegiatan kerjasama itu sendiri dinilai kurang menunjukkan kedekatan hubungan dari kedua negara tersebut dan juga dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara (*capacity building*). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mengenai bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam tatanan *confidence building measure* (CBM), dan dalam tatanan *capacity building* untuk meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS 2012-2017.

Diplomasi

Masyarakat internasional sekarang menyadari akan pentingnya praktik

diplomasi dalam hubungan internasional. Hal tersebut disebabkan karena diplomasi dianggap penting bagi suatu negara bukan hanya untuk merumuskan suatu kebijakan luar negeri yang cocok dan efektif terhadap negara lain, tetapi juga sebagai metodologi dan mekanisme yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri yang efisien.¹⁵ Supriyatno mendefinisikan diplomasi sebagai suatu interaksi dan komunikasi antara dua pemerintah atau lebih.¹⁶

Definisi lain menggambarkan diplomasi sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak yang terlibat, dan di dalamnya juga terdapat negosiasi untuk mencapai tujuan ataupun untuk memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambarnya.¹⁷ Sehingga, dapat dikatakan bahwa diplomasi merupakan sebuah interaksi yang melibatkan komunikasi dan negosiasi antar berbagai pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan tertentu.

Diplomasi Pertahanan

Cottey dan Foster menjelaskan bahwa di masa lalu, diplomasi pertahanan

mencakup berbagai kegiatan yang mungkin telah digambarkan sebagai kerjasama militer atau bantuan militer. Akan tetapi, terjadi pergeseran pada dekade terakhir yaitu diplomasi pertahanan sekarang tidak hanya digunakan dalam peran realpolitik untuk mendukung angkatan bersenjata dan keamanan sekutu, namun juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas.¹⁸ Diplomasi pertahanan kini didefinisikan sebagai semua metode dan strategi yang digunakan oleh negara yang mungkin sedang berkompetensi dengan negara lain, tetapi mereka telah menggunakan jenis praktik tertentu termasuk ekonomi, budaya, kerja sama politik, kerja sama pertahanan dan diplomasi untuk berteman, dengan harapan untuk bekerja sama satu sama lain, dan, yang paling penting untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya.¹⁹

Pengertian di atas menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan tidak hanya dilakukan oleh praktik pertahanan, tetapi

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm 29.

¹⁶ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hlm. 39.

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Opcit.*, hlm. 31.

¹⁸ Andrew Cottey dan F. Anthony, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (London: Oxford University Press, 2004), hlm. 26.

¹⁹ Rodon, Pedrason, *Asean's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community?*, (Heidelberg, Jerman: Universitat Heidelberg, 2015), hlm. 15.

juga melalui praktik ekonomi, budaya, dan kerjasama politik dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya. Diplomasi pertahanan memiliki tiga karakteristik utama, yaitu diplomasi pertahanan dalam tatanan *confidence building measure*, *capacity building*, dan *defense industry*.²⁰

Analisis terhadap diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS dijembatani melalui dua dari tiga karakteristik yang dijabarkan oleh Multazam diatas, yaitu diplomasi pertahanan dalam tatanan CBM dan diplomasi pertahanan dalam tatanan *capacity building*.

Confidence building measures (CBM) dilakukan untuk membangun hubungan baik antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan utamanya dilakukan untuk menghilangkan mispersepsi antar negara atau menurunkan ketegangan dengan cara saling terbuka dalam kebijakan negara, saling transparansi dalam pengembangan kemampuan atau kapabilitas militer, agar apa yang sedang dan telah dilakukan suatu negara tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara

lain. Dengan kata lain, CBM dilakukan untuk meningkatkan dan menunjukkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak atau kedua negara.²¹

Baviera menjabarkan ukuran dan bentuk dalam pelaksanaan CBMs yang dirangkum sebagai berikut:²²

Tabel 1.1 Indikator Confidence Building Measures

Military CBM's	Bilateral
Communication	Hotlines, regular, bilateral dialogue
Transparency	Defense White Paper, observance at military exercises, intelligence exchange
Consultation	Joint Commision
Goodwill	Visit, cross training code of conduct
Economic CBM	Preferential term of trade
Socio Cultural CBM's	Increase people to people links
Political CBM's	Contacts between politicla parties, parliaments, judiciary

Dalam menganalisa aktivitas CBM Indonesia dan AS dalam meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara

²⁰ Arifin Multazam, *Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 10.

²¹ *Ibid.*, hlm. 45.

²² A. S. Baviera, *Bilateral Confidence Building with China in Relation to the South China Seas Dispute: A Philliphine Perspective*, (Canada: Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada, 2001), hlm. 4.

merujuk kepada indikator yang dijabarkan oleh Baviera di atas dan fokus kepada aktivitas bilateral.

Karakter diplomasi pertahanan selanjutnya yaitu *capacity building* yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan kedua negara secara material. Pengembangan kemampuan atau kapabilitas pertahanan perlu untuk dilakukan oleh negara karena sistem internasional yang bersifat anarki dimana tidak ada kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi di atas negara itu sendiri, sehingga serangan dari negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingannya menjadi sangat mungkin terjadi.

Adapun diplomasi dalam tatanan ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman potensial. Dalam hal ini peran diplomasi adalah memungkinkan sebuah negara untuk dapat melakukan pembelian senjata dari negara lain dengan tujuan untuk pengembangan kekuatan pertahanan negara. Analisis mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS (2012-2017) akan merujuk pada indikator yang dijabarkan oleh Idil Syafwi (2009).

Kegiatan diplomasi pertahanan dalam tatanan *capacity building*, antara lain usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer, dan Pembelian alutsista, kredit ekspor.²³ Akan tetapi, hal tersebut juga mengacu kepada kebutuhan yang diperlukan oleh Indonesia yang akan dianalisis saat penelitian dilakukan. Hal ini akan dipertegas dan disesuaikan dengan hasil wawancara maupun studi pustaka yang lebih dalam pada proses pengambilan data.

Kerjasama Internasional

Kerjasama merupakan persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan yang dimiliki oleh dua negara atau lebih.²⁴ Menurut Yudhoyono, kerjasama internasional adalah upaya bersama untuk meraih tujuan dan kepentingan masing-masing pihak menurut ketentuan yang ada dan disepakati bersama.²⁵ Kerjasama merupakan pilihan yang jatuh apabila kepentingan nasional mustahil dapat dicapai dengan upaya sendiri.

²³ Arfin Multazam, *Opcit.* Hlm. 20.

²⁴ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), hlm. 392-394.

²⁵ Mohammad Shoelhi, *Opcit.*, hlm. 42-43.

Dalam melakukan hubungan dengan negara lain, Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif dimana dalam membangun kerjasama internasional berpedoman pada prinsip negara non blok yaitu tidak melakukan aliansi dengan negara manapun, akan tetapi Indonesia tetap aktif dalam kerjasama internasional demi menciptakan kawasan yang damai baik secara regional maupun global.²⁶

Kerjasama Pertahanan

Kerjasama pertahanan dilakukan demi mencapai kepentingan nasional suatu negara di bidang pertahanan. Selain itu, kerjasama pertahanan diselenggarakan untuk membangun rasa saling percaya antar negara lain dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan, dan juga sebagai modalitas dalam mencegah terjadinya konflik dengan negara lain. Adapun tujuan dilakukannya kerjasama pertahanan yaitu untuk membangun kemampuan pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI

melalui bidang pendidikan, latihan, dan kerjasama industri pertahanan.²⁷

Kemudian, terdapat dua jenis kerjasama pertahanan yaitu secara bilateral dan secara multilateral. Kerjasama pertahanan secara bilateral dilakukan untuk merealisasikan diplomasi pertahanan, yang penyelenggaraannya lebih kepada untuk membangun rasa saling percaya (*trust building*), dan mencari solusi damai dalam menangani isu-isu keamanan yang menjadi perhatian kedua negara. Sedangkan, kerjasama multilateral dilakukan bersama dengan negara-negara yang berada baik di kawasan maupun internasional, seperti kerjasama dalam kerangka ASEAN, forum dialog regional maupun internasional, kerjasama dalam mendukung misi perdamaian dunia, dan kerjasama dalam rangka bantuan kemanusiaan.²⁸

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, kemampuan operasional, profesionalisme sumber daya, manusia, dan juga modernisasi alutsista.

²⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm. 71.

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ibid., hlm. 72-89.

Geopolitik

Geopolitik berkembang pada awal tahun 1945. Teori ini semakin berkembang dan bahkan menjadi konsep terbaru seperti Geostrategi, Geoekonomik, hingga Geoteknologi.²⁹ Bert mendefinisikan geopolitik sebagai penggambaran dari pengaturan geografis dan hubungannya dengan kekuatan politik dan penetapan kerangka kerja spasial yang mencakup unit kekuatan politik seperti samudra, batas daratan dan laut, sumber daya alam, dan juga budaya.³⁰ Said menjelaskan bahwa geopolitik melibatkan studi hubungan mengenai politik, geografi, demografi, dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara.³¹

Geopolitik memandang penting bagaimana faktor-faktor seperti geografi – yang didalamnya terdapat teritori, populasi, lokasi strategis, dan sumber daya alam – di bungkus dengan ekonomik dan teknologi yang kemudian akan mempengaruhi hubungan antar negara

guna memandang tatanan dunia.³²

Dengan pengertian diatas, menjelaskan bahwa geopolitik adalah alat atau metode untuk menganalisis isu hubungan internasional, dan Konsep geopolitik ini akan digunakan sebagai landasan mengenai alasan terbentuknya suatu kerjasama pertahanan bilateral antara Indonesia-AS.

Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Tatanan *Confidence Building Measure (CBM)*

Bila melihat kembali beberapa tahun ke belakang, hubungan Indonesia dan AS khususnya dalam kerjasama pertahanan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dilihat dari terbukanya kembali jalur kerjasama pertahanan antara kedua negara setelah beberapa dekade AS menjatuhkan sanksi embargo terhadap Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini dapat dilihat bahwa AS belum sepenuhnya percaya dengan kemajuan profesionalisme TNI dengan masih diberlakukannya *Human Rights Vetting* atau yang dikenal juga dengan *Leahy Law*. Kebijakan ini menunjukkan bahwa masih belum terbangunnya rasa percaya AS terhadap demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sehingga, diindikasikan bahwa

²⁹ Djoko B. Said, *Geopolitik dan Kepentingan Nasional Indonesia*, (Amerika Serikat: CreateSpace Independent Books Publisher, 2015), hlm. 6.

³⁰ Chapman Bert, *Geopolitics: A Guide to the Issues*, (California: Praeger, 2011, hlm. 2.

³¹ Djoko B. Said, *Opcit.*, hlm. 9.

³² *Ibid.*

CBM yang terbangun oleh kedua negara masih belum tinggi, karena masih terdapat pembatasan dalam hubungan keduanya. Indikator yang dideskripsikan oleh Baviera³³ digunakan dalam menganalisis pelaksanaan CBM kedua negara dalam meningkatkan kerjasama pertahanan keduanya

Indikator yang pertama adalah *communication*, Baviera menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari pelaksanaan CBM adalah adanya forum komunikasi yang terjadi dalam hubungan bilateral³⁴, dan hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya reguler bilateral dialogue antara kedua negara. Dalam diplomasi pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dan AS ada beberapa forum dialog yang terbentuk antara lain adalah *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD) dan *United States-Indonesia Bilateral Defense Discussion* (USIBDD). IUSSD merupakan sebuah forum bagi Indonesia dan AS untuk berbagi informasi dan berdiskusi mengenai isu-isu keamanan global, regional, dan nasional yang menjadi perhatian bersama.³⁵ Dalam lima tahun terakhir, tidak ada pembahasan khusus mengenai *Human*

Rights Vetting, akan tetapi Indonesia terus menunjukkan perkembangan demokrasinya yang juga diapresiasi oleh AS.

Forum lain yang terbentuk adalah USIBDD, ini merupakan forum Forum dialog bilateral yang dilakukan antara militer Indonesia dengan militer AS yang terorganisir dan terukur. Forum ini meliputi dialog strategis dan kerjasama tingkat operasional hingga pada tahap merencanakan dan melaksanakan pelatihan, latihan, dan kegiatan pertukaran materi yang berkaitan.³⁶

Indikator kedua adalah *transparency*, dilakukan dengan pembukaan akses informasi mengenai postur, kemampuan dan kebijakan nasional negara-negara di bidang militer dan bidang terkait lainnya dengan maksud untuk mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman di antara negara yang bersangkutan.³⁷ Aktivitas transparansi antara Indonesia dan AS ditunjukkan dengan adanya publikasi Buku Putih Pertahanan negara. Selain itu, kerjasama dalam hal pendidikan dan pelatihan juga dilakukan keduanya. Tercatat sampai dengan tahun 2016

³³ A.S. Baviera. *Opcit.*, hlm. 4

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Opcit.*

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Amitav Acharya, *The ASEAN Regional Forum: Confidence Building*, 2011, hlm. 4

terdapat 6.077 personil mengikuti pendidikan di AS, sedangkan 142 personil dari AS melaksanakan pendidikan di Indonesia. Aktivitas transparansi diwujudkan juga dengan pertukaran informasi intelijen yang tertuang dalam *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)*.³⁸

Consultation merupakan indikator ketiga dalam pelaksanaan CBM dalam diplomasi pertahanan. Baviera menjelaskan bahwa bentuk dari aktivitas konsultasi dalam pelaksanaan CBM pada hubungan bilateral negara ditunjukkan melalui *Joint Commision*. Dalam hubungan bilateral Indonesia dan AS, forum konsultasi yang dibentuk kedua negara ini adalah *Joint Commission Meeting (JCM)* yang dilakukan untuk memperkuat kemitraan komprehensif bilateral antara Indonesia dan AS dan untuk meningkatkan kontribusi kedua negara terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini. Forum JCM ini terbagi dari beberapa grup, antara lain, antara lain *Working Group on Democracy and Civil society, Security, Trade and Investment, Energy, Education, Climate and Environment*.³⁹

³⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2017, *Opcit*.

³⁹ U.S. Department of State, *US-Indonesia Joint Commission and Bilateral Meeting*, diakses pada

Indikator keempat adalah *goodwill* yang ditunjukkan dengan diadakannya kunjungan bilateral oleh Indonesia. Kunjungan kenegaraan kedua negara diringkas pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Kunjungan Kenegaraan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat (2012-2017)

Tanggal	Kegiatan
5-9 September 2013	Dubes AS berkunjung ke Indonesia
12 September 2013	Secretary Assistant of State US berkunjung ke Indonesia
04 Oktober 2013	Secretary of State of US menghadiri Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting di Bali
13-20 Februari 2014	Secretary of States AS berkunjung ke Indonesia
07-05 Mei 2015	Menhan RI melakukan kunjungan ke AS
26 Oktober 2015	Presiden Joko Widodo dan Menhan RI berkunjung ke AS

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Indikator kelima adalah Economic CBM. Pada era Trump, economic CBM Indonesia dan AS kurang terbangun ditunjukkan dengan masuknya Indonesia dalam daftar negara penyebab defisit AS. Mengenai hal ini Trump akan mencari jalan untuk memperbaiki perekonomian dalam negerinya.

Pengamat politik CSIS, Phillips J Vermonte berpendapat bahwa dari segi politik ekonominya, Trump akan membuat kebijakan yang menjadikan biaya barang impor atau barang yang masuk ke AS lebih tinggi dari sebelumnya. Dan hal ini perlu diperhatikan oleh Indonesia karena dapat berdampak pada

17 Oktober 2017, dari U.S. Department of State Archive: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/147309.htm>.

pertahanan negara, melalui bidang ekonomi. Hal ini bisa berdampak pada perekonomian negara apabila Presiden Trump mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam hal proteksi perekonomian negaranya yang akan menghambat nilai atau jumlah ekspor barang Indonesia.⁴⁰

Indikator keenam dalam pelaksanaan CBM adalah *socio cultural*. Dalam indikator ini hubungan bilateral ditunjukkan dengan adanya *people to people links* dari kedua negara. Pemerintahan Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang warga dari tujuh negara Muslim untuk masuk ke AS.⁴¹ Walaupun Indonesia tidak termasuk ke dalam tujuh negara tersebut, hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Akan sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia apabila AS menyamaratakan Islam di Indonesia dengan Islam di Timur Tengah, dengan menganggap sebagai ancaman.

⁴⁰ Annisa Ayu Artanti, *Trump Dinilai Tak Akan Terlalu Bersinggungan dengan Indonesia*, diakses pada 2 Januari 2018, dari Metro TV News: <http://m.metrotvnews.com/read/2017/01/22/646477/trump-dinilai-tak-akan-terlalu-bersinggungan-dengan-ind>.

⁴¹ Rita Uli Hutapea, *Ini 7 Negara Muslim yang warganya Dilarang Trump Masuk ke AS*, diakses pada 6 Januari 2018, dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-3407888/ini-7-negara-muslim-yang-warganya-dilarang-trump-masuk-ke-as>.

Dalam menghadapi hal ini Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan para pemuka agama di AS dengan tujuan untuk memberi pemahaman tentang Islam yang ada di Indonesia, bagaimana Indonesia menghadapi toleransi beragama, dan bagaimana Indonesia menyelesaikan isu-isu agama. Hal ini perlu diketahui oleh pemerintah AS.⁴²

Pertemuan para pemuka agama ini dihadiri dari berbagai agama baik Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Islam untuk membahas isu-isu yang sedang terjadi. *Socio cultural CBM* ini perlu ditingkatkan dengan mengadakan pertemuan rutin para pemuka agama sehingga CBM terbangun dengan baik, dan kecurigaan AS dapat menurun.

Indikator ketujuh adalah *political CBM*. Kejadian pemilu gubernur DKI Jakarta yang terjadi pada awal tahun 2017 menimbulkan interpretasi negara-negara di dunia, termasuk AS, bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Pemilu tersebut dianggap sebagai ujian toleransi agama dan etnik bagi di Indonesia. hal demikian juga menimbulkan kekhawatiran negara di dunia bahwa kelompok Islam garis keras

⁴² Leonard Felix Hutabarat, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 20 Desember 2017, (F. Nuzulia, Pewawancara).

akan terus berusaha menggunakan agama sebagai senjata politik. Dalam hal ini pemerintah Indonesia terus menunjukkan dan mengutarakan pada setiap kesempatan bahwa demokrasi di Indonesia mengarah pada arah yang sama, dan kontak antara pejabat kedua negara sudah dilakukan pada forum-forum dialog yang mereka bentuk.

Diplomasi Pertahanan dalam Tatanan *Capacity Building*

Pada subbab ini akan membahas upaya diplomasi yang digunakan Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan kedua negara. Pengembangan kemampuan pertahanan perlu dilakukan untuk menghadapi ancaman potensial yang akan dihadapi oleh suatu negara. Dalam kerjasama yang sedang dilakukan oleh Indonesia dan AS ini, terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yaitu dengan mengadakan latihan bersama, dan juga melalui pengadaan alutsista.⁴³

Peningkatan kapasitas dipandang sebagai elemen penting jika perkembangan dilakukan secara

berkelanjutan dan berpusat kepada manusia. Peningkatan kapasitas merupakan pendekatan untuk sebuah perkembangan, dan merupakan sebuah respon dari proses perubahan.⁴⁴

Hubungan antara Indonesia dan AS sudah mengalami peningkatan didorong dengan perkembangan yang dilakukan oleh Indonesia setelah kasus Timor Timur yang menyebabkan sanksi embargo atas isu HAM yang dilakukan Indonesia pada wilayah tersebut.⁴⁵ Hubungan mulai membaik kembali ditunjukkan dengan dibukanya kerjasama pertahanan oleh kedua negara, salah satunya adalah latihan militer gabungan.

Latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Indonesia dan AS salah satunya adalah latihan bersama Korps Marinir TNI AL dengan United States Marine Corps (USMC) yang merupakan bagian dari latihan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) yang bertujuan bukan hanya untuk mempererat hubungan baik Angkatan Laut kedua negara tapi juga untuk meningkatkan profesionalisme militer khususnya angkatan laut. Latihan ini

⁴³ Arifin Multazam, *Opcit.*, hlm. 20.

⁴⁴ Deborah Eade, *Capacity-Building: An Approach to People-Centred Development*, (UK: Oxfam GB, 2007). hlm. 1.

⁴⁵ Leonard Felix Hutabarat, *Opcit.*,

terakhir dilakukan pada September 2017 lalu bertempat di Indonesia.

Kedua negara melaksanakan Latihan bersama lainnya, yaitu *Garuda Shield Program* yang merupakan latihan bilateral yang dilakukan oleh US Army Pacific (USARPAC) dan TNI AD yang bertujuan untuk mempromosikan hubungan militer ke militer yang positif, dan juga meningkatkan interoperabilitas, meningkatkan kesadaran budaya, dan meningkatkan pelatihan individu dan kolektif. Pelatihan tingkat taktis ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi teknis unit-unit subordinat dan mendorong interoperabilitas taktis antar mitra.⁴⁶

Latihan militer gabungan ini bertujuan untuk membangun profesionalitas militer yang sesuai dengan nilai demokrasi dan HAM. Diharapkan hal ini akan membantu reformasi TNI dan menjadikannya sejalan atau sepemahaman dengan nilai-nilai demokrasi yang dipromosikan oleh AS, sehingga hal ini dapat menyamakan persepsi bagi kedua negara. Sebagaimana yang tercantum pada Buku Putih Pertahanan bahwa tujuan dilakukannya

kerjasama pertahanan yaitu selain untuk mencegah terjadinya konflik dengan negara lain, juga untuk membangun kemampuan pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan, dan kerjasama industri pertahanan.

Setelah dicabutnya embargo AS atas bantuan peralatan alutsista Indonesia, tidak ada pembatasan yang khusus yang diberikan AS untuk Indonesia, karena hingga saat ini tidak ada masalah-masalah yang menonjol di antara keduanya. Walaupun terdapat isu-isu yang terjadi, seperti AS mengkritik akan apa yang terjadi di dalam negeri Indonesia, salah satunya adalah kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) calon Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Hal tersebut masuk dalam catatan AS, akan tetapi tidak sampai menghambat pengadaan peralatan alutsista, tidak sampai menjadi prasyarat pembelian alutsista, dan tidak sampai kembali pada kasus Timor Timur sebelumnya.⁴⁷

Selanjutnya, keterbukaan dalam latihan bersama terus ditunjukkan AS dimana AS terus menawarkan diri untuk dilibatkan dalam operasi militer

⁴⁶ U.S Army pacific. *Exercise Garuda Shield*, diakses pada 25 Januari 2018, dari STAND-TO: The Official Focus of the U.S Army: <https://www.army.mil/standto/2017-09-18>.

⁴⁷ Leonard Felix Hutabarat, *Opcit.*,

Indonesia.⁴⁸ Akan tetapi, Indonesia tidak mau melibatkan AS terlalu jauh karena ditakutkan hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan bagi negara lain. Indonesia harus tetap mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktifnya yang berpedoman pada prinsip negara non blok yaitu dengan tidak memihak pada blok manapun atau tidak melakukan aliansi dengan negara manapun, akan tetapi Indonesia tetap aktif dalam kerjasama Internasional demi menciptakan kawasan yang damai baik secara regional maupun global.⁴⁹

Sejalan dengan hal tersebut, latihan bersama Indonesia dan AS yang belum sampai pada level strategis merupakan perwujudan dari politik bebas aktif Indonesia. Indonesia tidak bisa terlalu dekat dengan AS, seperti melakukan latihan bersama hingga level strategis dimana melibatkan tiga matra (darat, laut, udara), karena dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan bagi negara lain. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara tersebut, sehingga menjadi hal yang wajar apabila Indonesia memiliki latihan militer

bersama sampai pada level strategis dengan Malaysia. Hal tersebut dilakukan kedua negara untuk menghadapi ancaman bersama.⁵⁰

Selanjutnya, diplomasi pertahanan Indonesia dalam peningkatan kemampuan antara Indonesia dan AS tidak ada lagi kesulitan baik dalam kesepakatan maupun kerjasama pertahanan. Duta besar AS, Robert Blake mengatakan bahwa embargo bukan lagi merupakan masalah dalam kerjasama pertahanan kedua negara, hal tersebut ditunjukkan dengan dijualnya helikopter Apache oleh AS ke Indonesia tanpa adanya syarat diantara kesepakatan kedua negara tersebut.⁵¹

Dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pada tahun 2013 ditandatangani kontrak pembelian 8 unit helikopter Apache AH64E yang akan diterima secara bertahap mulai akhir 2017 hingga awal 2018. Pembelian Helikopter Apache ini menimbulkan antusias sendiri bagi beberapa kalangan, pertama karena pengadaan helikopter buatan AS ini

⁴⁸ M. Wirda Prayogo, Markas Besar TNI, (F. Nuzulia, *Pewawancara*), 19 Desember 2017.

⁴⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm. 71.

⁵⁰ M. Jaki Nurhasya, Kementerian Luar Negeri RI, (F. Nuzulia, *Pewawancara*), 20 Desember 2017.

⁵¹ Fajar Nugraha, *Dubes AS, tak ada kesulitan jual senjata ke Indonesia*, diakses pada 2 Januari 2018, dari Metro TV News: <http://www.metrotvnews.com/amp/ObzJWEob-dubes-as-tak-ada-kesulitan-jual-senjata-ke-indonesia>.

mengindikasikan kepercayaan AS terhadap Indonesia setelah pencabutan sanksi embargo, kedua karena helikopter serang ini memiliki tingkat kecanggihan yang tinggi. Sehingga, Pembelian helikopter serang yang disebut sebagai salah satu yang tercanggih di dunia itu diharapkan makin memperkuat TNI, khususnya TNI AD.⁵²

Sebelumnya, Indonesia menerima hibah 24 unit pesawat F-16 yang merupakan merupakan pesawat bekas pakai United States Air Force (USAF) yang sebelumnya ditawarkan oleh pihak AS pada pertemuan di East Asian Summit 2011 yang kemudian disetujui oleh pemerintah Indonesia.⁵³

Pembelian alutsista yang berikutnya adalah pembelian 95 unit Tank M113 A1-BE, keseluruhan unitnya sudah diterima dan didistribusikan ke satuan pengguna. Pembelian alutsista ini dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pertahanan khususnya dalam memodernisasi peralatan militer agar tidak tertinggal dengan negara lain. Pengadaan alutsista ini juga bertujuan

untuk memudahkan latihan bersama yang dilakukan TNI dengan negara lain dengan adanya *interoperability*.

Berdasarkan data diatas dua indikator mengenai diplomasi pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yaitu usaha-usaha kerjasama strategis yang meliputi latihan militer gabungan, dan pembelian alutsista sudah dilakukan oleh Indonesia. Sehingga, diplomasi pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat sudah cukup baik. Akan tetapi, apabila melihat kepentingan Indonesia saat ini, Indonesia membutuhkan pengadaan alutsista yang juga disertai dengan alih teknologi. Hal ini seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 mengenai industri pertahanan yang merupakan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pertahanan khususnya kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Dan hal ini belum tercapai di dalam kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam mewujudkan hal ini, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Indonesia. Kendala tersebut yaitu kesiapan Indonesia baik dari sumber daya manusianya maupun dari sistem yang Indonesia miliki, dan juga kendala dari

⁵² Antonius, *AH-64E Guardian: Pengawal Infanteri TNI*. Majalah Commando, Volume IX, Edisi No. 5, 2013.

⁵³ Artileri, *F-16 Bekas Pakai USAF atau Pesawat-pesawat Canggih dan Pesawat Tua Indonesia*, diakses pada 09 November 2017, dari Artileri: <http://www.artileri.org/2012/02/apa-ya-judulnya-f-16-bekas-pakai-usaf.html>.

pihak AS yaitu AS terus memberi penjelasan bahwa untuk proses alih teknologi, pemerintah AS tidak dapat ikut campur karena kewenangan tersebut dipegang oleh perusahaan, sehingga proses jual beli ini murni *business to business*.

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat dalam meningkatkan kerjasama pertahanan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan *confidence building measure* (CBM) secara umum sudah cukup baik. Dari tujuh indikator, empat indikator sudah dilaksanakan dengan baik oleh kedua negara yaitu *communication*, *transparency*, *consultation*, dan *goodwill*. Dalam indikator *communication*, Indonesia dan AS sudah memiliki forum dialog bilateral yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya yaitu IUSSD dan USIBDD. Dalam hal *transparency* Indonesia sudah melakukan publikasi atas Buku Putih Pertahanan negara dan juga dilaksanakannya latihan bersama seperti Carat dan Garuda Shield.

Selanjutnya dalam *consultation* kedua negara sudah membentuk *Joint commission meeting* yang terdiri dari beberapa *working groups* yang membahas isu-isu di bidangnya. Terakhir adalah indikator *goodwill* dimana kedua negara saling menunjukkan itikad baik dengan saling mengunjungi negara mitranya. Sedangkan, indikator yang perlu ditingkatkan adalah *economic CBM*, *socio cultural CBM*, dan *Political's CBM*. Dalam *economic CBM* masih terdapat masalah yaitu tidak seimbangnya perekonomian negara dimana AS mengalami defisit dan surplus berada pada Indonesia. Dalam *socio cultural CBM*, AS masih memiliki persepsi tidak bagus akan negara-negara Islam. Dan terakhir yaitu *Political's CBM* dimana demokrasi Indonesia masih belum sepenuhnya dipercaya oleh AS. Sehingga diharapkan, terdapat solusi untuk meningkatkan tiga indikator yang masih belum maksimal sehingga CBM dapat terbangun dengan baik dan timbulnya rasa percaya di antara keduanya sehingga dapat meningkatkan kerjasama pertahanan baik dalam pencapaian kesepakatan kerjasama yang lebih kuat maupun kesetaraan dalam kerjasama bilateral.

2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam meningkatkan *capacity building* dinilai sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya indikator-indikator yang terkandung di dalamnya yaitu latihan militer gabungan, dan pembelian alutsista. Akan tetapi, melihat kepentingan Indonesia yang berkeinginan meningkatkan kemampuan pertahanan dalam hal kemandirian industri pertahanannya, maka diharapkan diplomasi pertahanan ini dapat mendorong alih teknologi dalam setiap pengadaan alutsista dengan AS.

Saran

Saran Teoretis

Penelitian ini belum membahas secara mendalam mengenai kerjasama-kerjasama yang banyak dilaksanakan oleh Indonesia dan Amerika Serikat, ataupun forum-forum komunikasi yang dibentuk oleh kedua negara. Sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang dapat menjelaskan mengenai hal tersebut baik dampak yang didapat oleh kedua negara ataupun kekurangan dan kelebihan forum dan kerjasama tersebut.

Saran Praktis

Terdapat beberapa saran dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS, pertama, mengenai *economic CBM*, untuk mengatasi hambatan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap ekspor barang Indonesia, karena terdapat ketidakseimbangan pada neraca perdagangan kedua negara dimana defisit pada AS dan surplus pada Indonesia, maka pemerintah Indonesia dapat menyeimbangkan hubungan dagang tersebut dengan investasi. Kedua, mengenai *socio cultural CBM*, Indonesia bisa menginisiasi pertemuan para pemuka agama dengan pejabat pemerintahan dari Indonesia dan AS secara reguler agar terbukanya pemahaman yang sama mengenai Islam. Ketiga, menciptakan *second track diplomacy* seperti mengadakan pertemuan antara pakar diplomasi dengan Kongres AS di luar forum formal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan citra baik mengenai kemajuan demokrasi, profesionalitas TNI di mata Kongres AS. Sehingga peningkatan kerjasama pertahanan khususnya dalam kesetaraan diantara keduanya dapat terwujud. Keempat, Indonesia perlu menegaskan Undang-

Undang nomor 16 tahun 2012 dalam setiap pengadaan alutsista.

Daftar Pustaka

Buku

- Baviera, A. S. (2001). *Bilateral Confidence Building with China in Relation to the South China Seas Dispute: A Philliphine Perspective*. Canada: Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada.
- Bert, Chapman. (2011). *Geopolitics: A Guide to the Issues*, California, Praeger.
- Cottey, Andrew dan Anthony F. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, London: Oxford University Press.
- Eade, Deborah. (2007). *Capacity-Building: An Approach to People-Centred Development*. UK: Oxfam GB.
- Holsti, K.J. (1995). *International Politics: A Framework for Analysis*, New Jersey: Prentice Hall.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Said, Djoko, B. (2015). *Geopolitik dan Kepentingan Nasional Indonesia, Amerika Serikat*: CreateSpace Independent Books Publisher.
- Shoelhi, Mohammad. (2009). *Diplomasi Damai*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryokusumo, Sumaryo. (2004). *Praktik Diplomasi*. Jakarta: STIH IBLAM.

Jurnal

- Acharya, Amitav. (2011). *The ASEAN Regional Forum: Confidence Building*.

Website

- Artanti, Annisa Ayu. (2017, 22 Januari). *Trump Dinilai Tak Akan Terlalu Bersinggungan dengan Indonesia*. Diakses pada 2 Januari 2018, dari Metro TV News: <http://m.metrotvnews.com/read/2017/01/22/646477/trump-dinilai-tak-akan-terlalu-bersinggungan-dengan-ind>.
- Artileri. (2012, 23 Februari). *F-16 Bekas Pakai USAF atau Pesawat-pesawat Canggih dan Pesawat Tua Indonesia*. Diakses pada 09 November 2017, dari Artileri: <http://www.artileri.org/2012/02/apa-ya-judulnya-f-16-bekas-pakai-usaf.html>.
- Farid, Yuniman. (2010, 22 Juli). *AS Kembali akan Latih Kopassus?*. Diakses pada 09 Oktober 2017, dari Deutsche Welle: <http://www.dw.com/id/as-kembali-akan-latih-kopassus/a-5825360>
- Hutapea, Rita Uli. (2017, 28 Januari). *Ini 7 Negara Muslim yang warganya Dilarang Trump Masuk ke AS*. Diakses pada 6 Januari 2018, dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-3407888/ini-7-negara-muslim-yang-warganya-dilarang-trump-masuk-ke-as>.
- Mingkid, Grasella Sovia. (2017, 7 September). *Marinir Indonesia-Amerika Gelar Latihan Bersama di Situbondo*. Diakses pada 20 Oktober 2017, dari Detik News: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3632509/marinir-indonesia-amerika-gelar-latihan-bersama-di-situbondo>.
- Morrissey, Scott. 2006. *U.S Lifts Indonesia Arms Embargo*. Washington DC: Arms Control Association. Diakses dari

- https://www.armscontrol.org/act/2006_01-02/JANFEB-Indonesia
- Nugraha, Fajar. (2015, 21 Oktober). *Dubes AS, tak ada kesulitan jual senjata ke Indonesia*. Diakses pada 2 Januari 2018, dari Metro TV News: <http://www.metrotvnews.com/amp/ObzJWEob-dubes-as-tak-ada-kesulitan-jual-senjata-ke-indonesia>.
- Parameswaran, Prashanth. (2017, 15 April). *Trumps' Indonesia Challenge Begins with Pence Visit*. Diakses pada 28 September 2017, dari the Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/04/trumps-indonesia-challenge-begins-with-pence-visit/>.
- Rizky, Ramadhan. (2017, 22 Oktober). *Kronologi Panglima TNI ditolak Masuk Amerika Serikat*. Diakses pada 23 November 2017, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171022182029-20-250164/kronologi-panglima-tni-ditolak-masuk-amerika-serikat/>.
- Saragih, Rojas. (2013, 26 Agustus). *Amerika Serikat Setujui Penjualan AH-64E Apache*, Diakses pada 29 Agustus 2017, dari <https://jakartagreater.com/amerika-serikat-setujui-penjualan-ah-64e-apache/>.
- The Editorial Board. (2017, 27 April). *Election Tests Indonesian Democracy*. Diakses pada 25 September 2017, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/04/27/opinion/election-tests-indonesian-democracy.html>.
- United Press International. (1996, 8 March). *Indonesia May Buy F-16 Fighters*. Diakses pada 07 Oktober 2017, dari UPI Archived: <http://www.upi.com/Archives/1996/03/08/Indonesia-may-buy-F-16-fighters/8354826261200/>
- U.S Army pacific. (2017, 18 September). *Exercise Garuda Shield*. Diakses pada 25 Januari 2018, dari STAND-TO: The Official Focus of the U.S Army: <https://www.army.mil/standto/2017-09-18>.
- U.S. Department of State. (2010, September). *US-Indonesia Joint Commission and Bilateral Meeting*. Diakses pada 17 Oktober 2017, dari U.S. Department of State Archive: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/147309.htm>.
- Winarso, C. P. (2013). *Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia Sebelum dan Sesudah Embargo Senjata, Dikaji Dalam Bidang Militer*. Diakses pada 15 Agustus 2017 dari Education and Cultural Attache: <http://education.embassyofindonesia.org/2013/10/hubungan-amerika-serikat-dengan-indonesia-sebelum-dan-sesudah-embargo-senjata-dikaji-dalam-bidang-militer/>

Lain-lain

- Antonius. (2013). *AH-64E Guardian: Pengawal Infanteri TNI*. Majalah Commando: Volume IX. Edisi No. 5.
- Hutabarat, L. F. (2017, 20 Desember). (F. Nuzulia, Pewawancara). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Nurhasya, M. J. (2017, 20 Desember). (F. Nuzulia, Pewawancara). Kementerian Luar Negeri RI.
- Multazam, Arifin. (2010). *Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wibisono, Makarim. (2017, 8 Mei). *Defense Cooperation in International Relation Paradigm*. Dipresentasikan pada perkuliahan *Defense Cooperation*. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.

- Pedrasan, Rodon. (2015). *Asean's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community?*. Heidelberg, Jerman: Universitat Heidelberg.
- Prayogo, M. W. (2017, 19 Desember). (F. Nuzulia, Pewawancara). Markas Besar TNI.

